

Implementasi Massive Open Online Course (MOOC) pada Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) di Bapelkes Semarang

Implementation Of Massive Open Online Course (Mooc) In Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) At Bapelkes Semarang

Resti Dewi Wijayanti, Andreasta Meliala, Dwi Handono Sulistyono

Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada,
Email: restidewiwijayanti@mail.ugm.ac.id

Tanggal submit: 3 Juli 2023; Tanggal penerimaan: 30 September 2023

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, diperlukan pengembangan kompetensi, diantaranya melalui pelatihan. Bapelkes Semarang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pelatihan, salah satunya Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) yang menggunakan metode Massive Open Online Courses (MOOC). Penggunaan MOOC bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran. Namun berdasarkan evaluasi penyelenggaraan masih ditemukan keluhan peserta terkait implementasi MOOC. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap MOOC. Hasil evaluasi menjadi landasan dalam pengembangan cMOOC bagi pelatihan di bidang kesehatan termasuk kajian kebijakan yang memayunginya. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam dan pengambilan data sekunder. Hasil penelitian pada peserta pelatihan menunjukkan belum seluruhnya memiliki kemampuan literasi digital sehingga masih banyak kendala pelatihan dan untuk mengikuti pelatihan harus menggunakan Surat Tugas sehingga tidak bebas mengikuti pelatihan. Fasilitator memerlukan adaptasi dalam pembelajaran model Student Centered Learning (SCL). Belum ada payung hukum untuk pelaksanaan MOOC. Sehingga apabila akan dikembangkan menjadi cMOOC dibutuhkan pembatasan cMOOC untuk pelatihan knowledge base atau sebagai pre-requisite program bagi pelatihan lain. Serta penerbitan payung hukum yang mewadahi prinsip-prinsip MOOC.

Kata kunci: cMOOC; Pelatihan bidang kesehatan; MOOC; Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan; Evaluasi pelatihan

ABSTRACT

In order to improve the quality of health services, competency development is needed, including through training. Bapelkes Semarang has the task and function of organizing training, one of which is Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) which uses the Massive Open Online Courses (MOOC) method. The use of MOOC aims to improve the quality and quantity of learning. However, based on the evaluation of the implementation, there are still complaints from participants regarding the implementation of MOOC. So it is necessary to evaluate MOOC. The evaluation results become the basis for the development of cMOOC for training in the health sector including the review of the policies that underpin it. This research was conducted using descriptive qualitative method with in-depth interviews and secondary data collection. The results of the research on training participants showed that not all of them had digital literacy skills so that there were still many training obstacles and to take part in the training they had to use a Letter of Duty so they were not free to attend the training. Facilitators need adaptation in learning the Student Centered Learning (SCL) model. There is no legal umbrella for the implementation of MOOC. So that if it will be developed into cMOOC, it is necessary to limit cMOOC to knowledge base training or as a pre-requisite programme for other training. As well as the issuance of a legal umbrella that accommodates the principles of MOOC.

Keywords: cMOOC; Health Training; MOOC; Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan; Training Evaluation

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, diperlukan pengembangan kompetensi, diantaranya melalui pelatihan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelatihan harus di desain dengan baik agar tujuan pelatihan tercapai. Desain pelatihan umumnya meliputi tahapan analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi¹. Kelima tahap tersebut merupakan fase yang tidak terputus.

Bapelkes Semarang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pelatihan, salah

satunya Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) yang menggunakan metode *Massive Open Online Courses* (MOOC). MOOC yang digunakan, yaitu LJJ Kesehatan, yang dibangun oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan

Penggunaan MOOC bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran. Namun berdasarkan evaluasi penyelenggaraan masih ditemukan keluhan peserta terkait implementasi MOOC. Misalnya, peserta mengalami kejenuhan

dan kesulitan dalam belajar mandiri, sulit berinteraksi dengan fasilitator, serta kendala tidak stabilnya jaringan listrik dan internet.

Sedangkan kajian pustaka pada penelitian sebelumnya, MOOC hendaknya didesain semenarik mungkin, sehingga pelatihan dapat memiliki makna sesuai tujuan pelatihan². Fasilitator memiliki peran besar dalam mendesain materi MOOC³. Penelitian lain dilakukan dengan melakukan penelitian lebih komprehensif terhadap MOOC Coursera⁴. Dalam penelitian tersebut dibahas bahwa aspek desain instruksional, pengaturan MOOC, serta pengalaman belajar peserta merupakan aspek yang saling terkait dan mempengaruhi. Rekomendasi penelitian ini yaitu perlu dilakukan kajian terhadap platform MOOC selain Coursera, karena kemungkinan ada perbedaan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pada MOOC populer (Coursera, edX, Udacity, FutureLearn) dengan MOOC belum populer (LJJ Kesehatan)⁴.

Selain permasalahan terkait implementasi MOOC pada saat pelatihan, LJJ Kesehatan masih di desain berjenis xMOOC sehingga pelatihan dilakukan secara daring tetapi masih menggunakan pendekatan kelas tradisional^{5, 6}. Padahal jika LJJ Kesehatan dikembangkan dengan jenis cMOOC, dapat memfasilitasi lebih banyak peserta. Sehingga dapat meningkatkan kuantitas jumlah peserta pelatihan sesuai target transformasi kesehatan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa untuk mencapai target bidang kesehatan pada tahun 2024, diterbitkan 6 (enam) Pilar Transformasi Kesehatan⁷. Salah satu pilarnya yaitu Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK). Capaian pada pilar SDMK antara lain peningkatan kapasitas SDMK melalui pelatihan. Dalam lampiran peraturan tersebut, target pelatihan vokasi untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan sejumlah 28.000 SDMK. Sedangkan untuk pelatihan sesuai dengan 9 penyakit prioritas berjumlah 25.000 SDMK. Untuk itu, Menteri Kesehatan menekankan perlunya membangun cMOOC guna mencapai target jumlah SDMK yang dilatih.

Dengan mempertimbangkan hal berikut: (1) evaluasi penyelenggaraan MOOC yang diselenggarakan di Bapelkes Semarang, (2) desain pembelajaran ideal yang disampaikan oleh peneliti sebelumnya, (3) rekomendasi penelitian lanjutan yang disampaikan oleh Wu and Wang⁴

(4) potensi pengembangan LJJ Kesehatan yang semula berjenis xMOOC menjadi cMOOC serta kebijakan yang mengaturnya. Maka peneliti memandang perlunya mengkaji isi kebijakan untuk pengembangan LJJ Kesehatan menjadi cMOOC pada Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) yang dilaksanakan di Bapelkes Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*. Metode penelitian ini dipilih karena peneliti bermaksud memahami secara rinci dan mendalam tentang implementasi MOOC pada Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) yang dilaksanakan di Bapelkes Semarang pada tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama)

Pelatihan dilaksanakan secara *blended*, yaitu dengan mengkombinasikan antara *synchronous maya* menggunakan zoom cloud meeting pada hari ke 1 dan hari ke 6 – 10. Sementara hari ke 2 – 5 menggunakan *asynchronous maya* dengan MOOC LJJ Kesehatan. Fokus penelitian ini pada pelatihan pada saat menggunakan MOOC LJJ Kesehatan.

Karakteristik responden

Jumlah responden dalam penelitian ini 19 orang. Wawancara dilaksanakan terhadap seluruh responden. Tujuh orang alumni peserta pelatihan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) tahun 2022. Pimpinan alumni peserta pelatihan berjumlah 2 orang. Panitia penyelenggara pelatihan berjumlah 3 orang. Fasilitator pelatihan 4 orang, yaitu 3 orang dari Bapelkes Semarang dan 1 orang dari RSUD dr. Moewardi Surakarta. Sedangkan pemangku kebijakan, 2 orang dari Bapelkes Semarang dan 1 orang dari Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Hasil Penelitian Implementasi Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama)

1) Peserta pelatihan

Kemampuan peserta dalam menggunakan media digital beragam. Ada peserta yang mampu menggali pengetahuan dengan mencari berbagai sumber di internet, ada pula peserta yang merasa

cukup hanya belajar dari materi yang tersaji di MOOC. Interaksi yang dibangun peserta pelatihan menggunakan media sosial pendukung MOOC, juga memberi andil dalam keberhasilan. Beberapa peserta langsung menghubungi panitia penyelenggara atau fasilitator, ada pula peserta membangun jejaring belajar teman sebaya. Kemampuan dan semangat peserta dalam menggunakan MOOC pada pelatihan, berpengaruh terhadap adaptasi peserta dalam menggunakan MOOC LJJ Kesehatan sebagai media digital di bidang pelatihan. Serta menjadi salah satu potensi pengembangan LJJ Kesehatan menjadi cMOOC.

Sedangkan hal yang harus diatasi adalah izin peserta untuk mengikuti pelatihan yang harus mendapat surat tugas dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten/Provinsi atau Pimpinan Instansi. Padahal untuk mendapatkan surat tugas tersebut, peserta harus dihadapkan dengan masalah antrian pengembangan kompetensi pegawai.

2) Fasilitator pelatihan

Dalam pelaksanaan pelatihan tidak seluruh fasilitator berinteraksi dengan peserta pada saat menggunakan MOOC. Rata-rata peserta menghubungi fasilitator pada saat materi yang bertujuan menciptakan (tingkat 6 ranah kognitif Raksonomi Bloom). Peserta mengalami kesulitan dalam memahami materi dan mengerjakan evaluasi. Evaluasi yang digunakan pada pelatihan ini masih menggunakan soal uraian, sehingga menuntut fasilitator tetap mengambil peran untuk memberikan *feedback* terhadap hasil penugasan peserta. Sehingga fasilitator memerlukan adaptasi dalam pembelajaran model *Student Centered Learning (SCL)* pada MOOC.

3) Pemangku kebijakan

Pedoman pelaksanaan pelatihan yang digunakan saat ini yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan⁸, beserta turunannya seperti Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan, serta Pedoman Audit Mutu Internal. Memasuki era pandemi Covid-19, Kementerian Kesehatan khususnya Badan PPSDM melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan pelatihan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK. 02.02/IV/1081/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Bidang Kesehatan pada

Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019⁹. Akan tetapi, aturan tersebut tidak berlaku lagi seiring dengan dicabutnya status pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa usulan isi kebijakan yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan LJJ Kemenkes menjadi cMOOC. Sasaran isi kebijakan ini bisa digunakan tidak hanya untuk pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkatan Pertama) akan tetapi dapat digunakan untuk seluruh pelatihan di bidang kesehatan secara umum. Serta bukan hanya pada lingkup Bapelkes Semarang, akan tetapi Kementerian Kesehatan. Usulan isi kebijakannya yaitu:

cMOOC idealnya digunakan untuk pelatihan yang berbasis *knowledge base* atau sebagai *pre-requisite program* bagi pelatihan lain. Materi yang disajikan bertujuan untuk mengingat, memahami dan mengaplikasikan (kelompok dasar pada taksonomi Bloom)¹⁰. Sehingga mudah bagi peserta mempelajari materi secara mandiri. Kebijakan ini untuk meminimalisasi keluhan yang diungkapkan peserta dalam belajar mandiri pada materi yang bertujuan menganalisis, mengevaluasi dan mencipta (kelompok lanjutan pada taksonomi Bloom). Desain pelatihan berbasis *knowledge base* atau sebagai *pre-requisite program* juga memungkinkan untuk diukur keberhasilannya dengan evaluasi berbentuk pilihan ganda.

Kedua, kebijakan lain dalam pengembangan LJJ Kemenkes menjadi cMOOC yaitu penyusunan kebijakan yang memayungi cMOOC. Alternatif kebijakan ini perlu menjadi perhatian bagi pengampu kebijakan untuk menerapkan prinsip *massive* pada MOOC. Aturan kebijakan untuk mengatasi terbatasnya jumlah peserta pelatihan untuk non teknis (manajemen dan fungsional) yaitu 30 orang dan 25 orang pada pelatihan teknis yang telah tercantum pada Pedoman Penyusunan Kurikulum Modul Pelatihan di Bidang Kesehatan yang diterbitkan oleh Pusdiklat Aparatur, Badan PPSDM Kesehatan. Idealnya pelatihan menggunakan cMOOC dilaksanakan dengan skala besar dan tidak terbatas jumlah pesertanya^{11,12}.

Prinsip *open* pada cMOOC juga perlu mendapat perhatian. Sampai saat ini, peserta yang mengikuti pelatihan perlu mencantumkan Surat Tugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi atau Rumah Sakit untuk membuktikan bahwa peserta yang bersangkutan memang diutus dari instansinya. Padahal untuk menerapkan prinsip *open*, cMOOC idealnya diterapkan tanpa kualifikasi peserta^{11, 12}. Perlunya aturan terkait cMOOC tanpa kualifikasi

peserta ini sekaligus menerjemahkan arahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bahwa pelatihan cMOOC berfungsi untuk pengembangan kompetensi yang dilaksanakan *after hours*. Peserta dapat mempelajari setelah jam kerja, tanpa mengganggu tugas dan fungsi pekerjaannya.

Pelatihan yang dilaksanakan secara *online* juga belum tercantum pada Menteri Kesehatan untuk menggantikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan dan turunannya belum mengatur tentang pelatihan yang dilaksanakan secara daring. Pada saat pandemi, sempat terbit aturan yang mengatur pelatihan secara *synchronous maya* dan *asynchronous maya*, akan tetapi aturan tidak berlaku seiring dengan pencabutan status pandemi Covid-19 di Indonesia.

Akan tetapi tetap menjamin pelatihan tetap berjalan dengan baik, sesuai prinsip *course*, yaitu pelaksanaan pelatihan secara utuh. Aturan disusun dari saat penyusunan kurikulum, modul, media pembelajaran, pengajuan akreditasi pelatihan, penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan, sampai dengan penerbitan sertifikat pelatihan.

KESIMPULAN

Kementerian Kesehatan belum memiliki payung hukum untuk pengembangan LJJ Kesehatan menjadi cMOOC baik untuk pelatihan bidang kesehatan secara umum, maupun pada Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama) pada khususnya. Kebijakan untuk mengembangkan LJJ Kesehatan menjadi cMOOC yaitu terkait pembatasan cMOOC untuk pelatihan yang bersifat *knowledge base* atau sebagai *pre-requisite program* bagi pelatihan lain. Serta penerbitan payung hukum yang mewadahi prinsip-prinsip *Massive*, *Open*, *Online*, *Course* pada MOOC.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pribadi BA. Desain dan Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Implementasi Model ADDIE. Jakarta: Kencana; 2020.
2. Deng R, Benckendorff P. What are the key themes associated with the positive learning experience in MOOCs? An empirical investigation of learners' ratings and reviews. *Int J Educ Technol High Educ*. 2021 Dec;18(1):9.
3. Sari AR, Bonk CJ, Zhu M. MOOC instructor designs and challenges: what can be learned from existing MOOCs in Indonesia and Malaysia? *Asia Pacific Educ Rev*. 2020 Mar;21(1):143–66.
4. Wu B, Wang Y. Formation mechanism of popular courses on MOOC platforms: A configurational approach. *Computers & Education*. 2022 Dec;191:104629.
5. Yousef AMF, Chatti MA, Schroeder U, Wosnitza M, Jakobs H. The State of MOOCs from 2008 to 2014: A Critical Analysis and Future Visions. In: Zvacek S, Restivo MT, Uhomoihi J, Helfert M, editors. *Computer Supported Education [Internet]*. Cham: Springer International Publishing; 2015 [cited 2022 Oct 16]. p. 305–27. (Communications in Computer and Information Science; vol. 510). Available from: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-25768-6_20
6. Smith B, Eng M. MOOCs: A Learning Journey. In: Cheung SKS, Fong J, Fong W, Wang FL, Kwok LF, editors. *Hybrid Learning and Continuing Education [Internet]*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2013 [cited 2022 Oct 16]. p. 244–55. (Hutchison D, Kanade T, Kittler J, Kleinberg JM, Mattern F, Mitchell JC, et al., editors. *Lecture Notes in Computer Science*; vol. 8038). Available from: http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-39750-9_23
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan
9. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK. 02.02/IV/1081/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Bidang Kesehatan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)
10. Jie Z. Research on Mixed Teaching Method of Computer Basic Course Based on MOOC. 2021;8.
11. Sumarno D, Indrajit RE. Massive Open Online Course (MOOC) Sebuah Tren Pendidikan Masa Depan. Yogyakarta: CV. Andi Offset;
12. Pouezevara SR, Horn LJ. MOOCs and Online Education: Exploring the Potential for International Educational Development. :16.